



ASEAN DALAM MENYELESAIKAN KRISIS YANG TERJADI DI MYANMAR

Hartana, Kadek Dhyan Wahyuni

Universitas Bung Karno

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : hartana_palm@yahoo.com, dhyan@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juli 2021

Diterima: 2 Agustus 2021

Terbit: 1 September 2021

Keywords:

Rohingya, Myanmar, ASEAN, Human Rights

Abstract

Myanmar's Rohingya are a Muslim minority in one of the regions of Myanmar called Rakhine. In this case, Myanmar does not recognize the citizenship of the Rohingya ethnic group. They are one of Myanmar's 135 ethnic groups without official documentation and therefore have no citizenship. Other ethnic groups and governments in Rakhine State have used large-scale violence against them, and Rohingyas have also been forcibly taken to refugee camps or exiled to neighboring countries. The United Nations Refugee Agency As of 2012, more than 168,000 Rohingya had fled Myanmar, with hundreds of thousands more fleeing across the border into Bangladesh since violence resurfaced in August 2017 in connection with the issue under investigation. I'm assuming. right. Indeed, ASEAN's 2007 Declaration on the Protection and Promotion of Migrant Worker Rights focused only on migrant workers and not on refugees. The Rohingya's plight was exacerbated by the response of several Southeast Asian countries in 2015 when they turned back boats carrying thousands of desperate Rohingya. International pressure and media scrutiny over their refusal to help the people on the boat eventually led to Indonesia and Malaysia temporarily allowing the people to land. This has also led to several crackdowns on traffickers involved in transporting Rohingya.

Kata kunci:

Rohingya, Myanmar, ASEAN, Hak Asasi Manusia

Corresponding Author:

Hartana, e-mail :

hartana_palm@yahoo.com

Abstrak

Orang Rohingya di Myanmar adalah minoritas Muslim yang ada di salah satu daerah Myanmar bernama Rakhine, dimana dalam hal ini Myanmar tidak memberikan pengakuan atas kewarganegaraan terhadap etnis Rohingya dimana mereka sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis di Myanmar tanpa dokumen resmi dan karenanya tidak memiliki kewarganegaraan. Etnis lainnya bersama pemerintah di daerah Rakhine melakukan kekerasan massal terhadap mereka, disamping itu juga orang Rohingya secara paksa dimasukkan kedalam tempat pengungsian atau terpaksa terusir ke negara-negara tetangga. Badan pengungsi PBB melakukan perkiraan bahwa ada lebih dari 168.000 Rohingya yang telah melakukan pelarian dari Myanmar yang dimulai dari tahun 2012, dan ratusan ribu lainnya menyebrangi perbatasan menuju ke Bangladesh semenjak kekerasan terjadi kembali berkobar pada Agustus 2017. Penelitian Studi Kepustakaan merupakan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian yang dilakukan dengan mencari sumber seperti buku, majalah yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, dalam hal ini terkait dengan Peran ASEAN dan Hak Asasi Manusia. Deklarasi yang dilakukan oleh ASEAN pada tahun 2007 tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak Pekerja Migran nyatanya hanya menitikberatkan kepada pekerja migran daripada para pengungsi. Penderitaan Rohingya diperparah oleh tanggapan beberapa negara Asia Tenggara yang pada tahun 2015 menolak perahu yang membawa ribuan Rohingya yang putus asa. Tekanan internasional yang intensif dan pengawasan media atas penolakan mereka untuk membantu para pengungsi perahu akhirnya menghasilkan Indonesia dan Malaysia mengizinkan orang untuk mendarat sementara. Ini juga menyebabkan beberapa tindakan keras terhadap para pedagang manusia yang terlibat dalam pengangkutan Rohingya.

@Copyright 2021.

PENDAHULUAN

Krisis saat ini di Myanmar secara langsung menantang nilai-nilai universal hak asasi manusia dan keadilan sosial yang diabadikan dalam Piagam ASEAN.

Sejak kudeta 1 Februari, lebih dari 850 orang telah tewas per 10 Juni karena pasukan keamanan terus menindak pengunjung rasa anti-kudeta.¹

Dimana diperkirakan satu juta etnis Rohingya yang ada Myanmar, sebuah kelompok minoritas Muslim dari Negara Bagian Rakhine, tidak mendapatkan pengakuan oleh Pemerintah Myanmar, Rohingya merupakan salah satu etnis dari 135 etnis lainnya yang ada di Myanmar. Rohingya nyatanya tidak memiliki dokumen resmi dan oleh sebab itu orang dari etnis Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan. Kekerasan yang terus meluas dalam cangkupan besar yang dilakukan oleh etnis lain bersama dengan pemerintah memaksa mereka masuk kedalam tempat pengungsian atau terusir ke negara lain dengan kondisi yang memperhatikan semenjak tahun 2012²

Dewan pengungsi dari PBB menyatakan bahwa memperhitungkan bahwa terdapat kurang lebih dari 168.000 orang Rohingya yang melakukan pelarian dari Myanmar yang dimulai dari tahun 2012, dan ratusan ribu lainnya telah menyebrangi perbatasan antar negara menuju ke daerah Bangladesh sejak penindasan akan orang Rohingya terjadi dan meluas pada Agustus 2017. Dilain sisi dunia internasional memberikan tanggapan yang bervariasi akan kekerasan yang terjadi, hal ini diakibatkan acuan dari pemerintah Myanmar adalah melakukan reformasi terhadap demokrasi yang kurang kokoh, ada juga kecaman luas terhadap pemerintah Myanmar karena tidak bisa melindungi penduduk Rohingya. Sebuah laporan tahun 2016 oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Rohingya "dapat menunjukkan kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan jika diperintahkan oleh pengadilan"³, dan laporan yang sangat kritis oleh Inisiatif Kejahatan Negara Internasional. Tahun sebelumnya menyimpulkan bahwa "Rohingya mendekati tahap akhir"⁴.

Baru-baru ini, pemimpin Myanmar yang bernama Aung San Suu Kyi, telah dikritik secara luas oleh komunitas internasional karena tidak cukup mengutuk kekerasan baru tersebut. Krisis regional ini harus dimulai dengan tanggung jawab pemerintah Burma dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak penduduk Muslim Rohingya. Tidak dapat dipertahankannya penggunaan istilah untuk menghindari subjek kontroversial terkait dengan penggunaan "Rohingya". Pertama, pemerintah harus mengatasi keadaan tanpa kewarganegaraan yang dihadapi oleh penduduk Rohingya, karena nyatanya hidup tanpa kewarganegaraan membuat etnis Rohingya mudah mengalami diskriminasi dan pelecehan. Myanmar terkenal sebagai sebuah negara yang baru-baru ini mendapatkan demokrasi, sehingga harusnya Myanmar lebih menghormati adanya perbedaan etnis dan agama yang ada di Myanmar sendiri tanpa melakukan diskriminasi terhadap suatu

¹ Aljazeera. 2021. Myanmar menargetkan Aung San Suu Kyi dengan tuduhan korupsi baru. Tersedia pada <https://www.aljazeera.com/news/2021/6/10/myanmar-targets-aung-san-suu-kyi-with-new-corruption-charges>. Diakses pada 22 Desember 2022

² UNHCR. 2016. Gerakan Campuran di Asia Tenggara 2016. Tersedia pada www.refworld.org/pdfid/590b18a14.pdf. Diakses pada 22 Desember 2022

³ PBB. 2016. Situasi HAM Muslim Rohingya dan minoritas lainnya di Myanmar, Laporan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, 29 Juni 2016

⁴ Green P, T dkk. 2015. Hitung mundur ke Pemusnahan: Genosida di Myanmar, Prakarsa Kejahatan Negara Internasional. Tersedia pada <http://bit.ly/ISCI-Countdown-Myanmar-2015>. Diakses pada 22 Desember 2022

kelompok secara sistematis. Rakhine merupakan negara bagian dari Myanmar yang ternyata mengalami Konflik dan kekerasan selama bertahun-tahun, terlebih walaupun negara telah melakukan kontrol yang ketat terhadap wilayah tersebut dan mendapatkan banyak perhatian media, namun ternyata malah mengikis niat baik internasional, hal ini karena Muslim Rohingya melarikan diri.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode studi kepustakaan atau studi literatur dimana dalam penelitian ini dilakukan kegiatan pengumpulan data melalui kegiatan mencatat dan membaca dan melakukan olah data penelitian. Dimana dilakukan penemuan sumber primer dan skunder terkait, melalui Majalah, Buku, Koran, Jurnal maupun sumber situs Internet.

Penelitian Studi Kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mencari sumber seperti buku, majalah yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, dalam hal ini terkait dengan Peran ASEAN terkait Hak Asasi Manusia. Sehingga dari data mentah yang didapatkan di lapangan akan dilakukan analisis data. Dari sini akan diperoleh teori relevan yang nantinya akan didialektika untuk mendapatkan informasi secara utuh terkait dengan materi yang diteliti.

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Desember 2022, yang dimulai dengan menggumpulkan sumber kemudian membaca dan mencatat poin terkait dengan bahasan, melakukan analisis dan penyusunan materi menjadi bentuk artikel ilmiah, berdasarkan sumber primer seperti Buku dan koran serta sumber skunder melalui situs internet ataupun majalah.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Pencarian dilakukan terhadap berbagai sumber tertulis, baik berupa buku- buku, arsip, majalah, artikel, dan jurnal, atau dokumen-dokumen serta situs situs internet yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam penyusunan karya tulis, terdapat beberapa langkah yang dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut. Pada tahap persiapan peneliti membuat kerangka berfikir yang bertujuan agar penulis lebih mudah dalam mencari informasi yang terkait sejarah sebagai upaya dalam pengimplementasian wawasan nusantara di era globalisasi. Editing adalah mengkaji dan meneliti kembali data yang sudah didapatkan kemudian dipersiapkan untuk proses pengolahan selanjutnya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan editing dalam hal mencocokkan berbagai sumber-sumber relevan yang didapat melalui studi kepustakaan sehingga data yang diperoleh dapat di pastikan keabsahannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Krisis Rohingya telah menjadi krisis kemanusiaan besar dengan konsekuensi regional dalam waktu lima tahun. Sehingga krisis ini memberikan tantangan besar bagi 10 negara anggota ASEAN dan institusi mereka, dan menggaris bawahi kurangnya landasan politik dan hukum dari ASEAN untuk mengatasi permasalahan pengungsi. Nyatanya hanya Filipina dan juga Kamboja yang menjadi pihak Konvensi 1951 terkait Status Pengungsi atau Protokol 1967.

Deklarasi yang dilakukan oleh ASEAN pada tahun 2007 tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak Pekerja Migran lebih banyak menitikberatkan kepada pekerja migran daripada para pengungsi yang mencari tempat tinggal baru. Penderitaan

Rohingya diperparah oleh tanggapan beberapa negara Asia Tenggara yang pada tahun 2015 menolak perahu yang membawa ribuan Rohingya yang putus asa. Tekanan internasional yang intensif dan pengawasan media atas penolakan mereka untuk membantu para pengungsi perahu akhirnya menghasilkan Indonesia dan Malaysia mengizinkan orang untuk mendarat sementara. Ini juga menyebabkan beberapa tindakan keras terhadap para pedagang manusia yang terlibat dalam pengangkutan Rohingya.

Pada Mei 2015, otoritas Thailand dan Malaysia ditemukan kuburan massal, diyakini dari Rohingya, di kamp-kamp perdagangan manusia yang ditinggalkan di sepanjang perbatasan bersama mereka. Hal ini membuat anggota Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime (yang memiliki 45 negara anggota) untuk mengakui kebutuhan mendesak dan kolektif tanggapan atas isu-isu seperti itu. Mereka sepakat untuk memiliki mekanisme yang akan memberikan otoritas kepada co-chairs Indonesia dan Australia “untuk berkonsultasi, dan jika perlu, mengadakan pertemuan di masa depan untuk membahas masalah migrasi tidak teratur yang mendesak dengan negara-negara yang terkena dampak dan berkepentingan dalam menanggapi masalah regional saat ini atau situasi darurat di masa depan”.⁵ Prinsip khas Piagam ASEAN adalah “tidak mencampuri urusan dalam negeri Negara-negara Anggota ASEAN”⁶

Terlepas dari prinsip ini, karena meningkatnya ketegangan di kawasan setelah krisis pengungsi Rohingya tahun 2015, beberapa negara mayoritas Muslim, seperti Malaysia dan Indonesia, mulai mengambil sikap yang lebih tegas dalam melindungi Muslim Rohingya. Meskipun Indonesia telah menyatakan bahwa krisis Rohingya adalah masalah regional, Indonesia telah mengikuti prinsip non-intervensi, dengan menekankan bahwa Indonesia akan menjalankan kebijakan 'keterlibatan konstruktif' daripada menekan Myanmar. Malaysia, di sisi lain vokal mengutuk Myanmar.

Myanmar mengambil beberapa langkah untuk meredakan kekhawatiran. Atas permintaan Malaysia, Aung San Suu Kyi mengadakan pertemuan informal khusus dengan menteri luar negeri ASEAN di Yangon pada Desember 2016 untuk membahas keprihatinan internasional atas situasi tersebut. Suu Kyi mengatakan bahwa Myanmar akan memberikan pembaruan rutin tentang krisis tersebut kepada sesama anggota ASEAN dan mungkin bekerja sama dengan mereka untuk mengoordinasikan upaya bantuan. Pemerintah Myanmar juga mengizinkan beberapa anggota media yang telah disetujui sebelumnya untuk mengunjungi Maungdaw, salah satu lokasi utama konflik. Suu Kyi juga membentuk Komisi Penasihat Negara Bagian Rakhine, diketuai oleh Kofi Annan dan beranggotakan enam anggota nasional dan tiga internasional.

Dalam laporan akhirnya, yang diterbitkan pada Agustus 2017, Komisi Penasihat merekomendasikan beberapa cara untuk meningkatkan akuntabilitas dan menemukan solusi jangka panjang terhadap keadaan tanpa kewarganegaraan yang berlarut-larut dari komunitas Muslim di Negara Bagian Rakhine. Juga

⁵ Pernyataan Co- Chairs BRMC VI. Konferensi Tingkat Menteri Ke- enam Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime, 23 Maret 2016. Tersedia pada <http://bit.ly/BaliProcess-2016>. Diakses pada 22 Desember 2022

⁶ .ASEAN (2007) Piagam Asean Tersedia pada <http://bit.ly/ASEAN-Charter-2007>. Diakses pada 22 Desember 2022

disarankan bahwa Myanmar dapat meningkatkan hubungan bilateral dengan Bangladesh dan bahwa kedua negara harus memfasilitasi pemulangan sukarela pengungsi dari Bangladesh ke Myanmar melalui verifikasi bersama. Ini juga merekomendasikan keterlibatan berkelanjutan Myanmar dengan negara tetangga ASEAN, memberi pengarahan secara teratur tentang dimensi yang lebih luas dan implikasi regional dari situasi di Negara Bagian Rakhine. Juga disarankan bahwa Myanmar dapat meningkatkan hubungan bilateral dengan Bangladesh dan bahwa kedua negara harus memfasilitasi pemulangan sukarela pengungsi dari Bangladesh ke Myanmar melalui verifikasi bersama.

Ini juga merekomendasikan keterlibatan berkelanjutan Myanmar dengan negara tetangga ASEAN, memberi pengarahan secara teratur tentang dimensi yang lebih luas dan implikasi regional dari situasi di Negara Bagian Rakhine. Juga disarankan bahwa Myanmar dapat meningkatkan hubungan bilateral dengan Bangladesh dan bahwa kedua negara harus memfasilitasi pemulangan sukarela pengungsi dari Bangladesh ke Myanmar melalui verifikasi bersama. Ini juga merekomendasikan keterlibatan berkelanjutan Myanmar dengan negara tetangga ASEAN, memberi pengarahan secara teratur tentang dimensi yang lebih luas dan implikasi regional dari situasi di Negara Bagian Rakhine.

Pertemuan yang diadakan oleh negara-negara ASEAN demi melakukan peninjauan terhadap krisis merupakan awal yang baik, namun situasi tersebut membutuhkan pengawasan yang ketat untuk meningkatkan perlindungan pengungsi hingga kerja sama regional. Negara Anggota harus melakukan pengembangan kebijakan pengungsi dan pencari tempat tinggal (mereka yang terusir dari negaranya) yang memberikan panduan tentang keputusan yang perlu dilakukan sebagai solusi jika terjadi masalah di Negara Anggota seperti permasalahan besar yang berdampak pada pelarian diri warga/suatu kelompok dari suatu negara ke negara lain. Kebijakan yang dibuat dan diterapkan bersama oleh negara anggota ASEAN kemudian akan menolong mengurangi eskalasi pertentangan dan gesekan antar etnis atau agama antar negara di masa mendatang. Setiap konflik yang terjadi di masa mendatang dapat diselesaikan melalui Komisi Hak Asasi Manusia Antar pemerintah ASEAN, tetapi badan ini perlu diperkuat karena tidak adanya landasan terkait hak perlindungan dan melakukan penyelidikan.

Dengan lima poin konsensus yang dirumuskan dalam ASEAN Leaders' Meeting yang diselenggarakan pada 24 April di Jakarta, ASEAN akhirnya meletakkan landasan untuk menyelesaikan krisis di Myanmar. Ada banyak cara untuk menyelesaikan situasi saat ini, tetapi aspek-aspek kunci mengenai perbedaan budaya dan politik di Myanmar dan kenyataan di lapangan harus diakui agar resolusi damai berhasil dalam jangka panjang. Pertama, ASEAN harus meredakan ketegangan antara semua pihak yang terlibat dan mengamankan komitmen kuat mereka menuju konsensus lima poin khususnya penghentian segera permusuhan sebelum situasi semakin memburuk. Sementara itu, ASEAN harus menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi dan selusin pejabat tinggi pemerintahannya serta anggota partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang ditangkap pada 1 Februari untuk memungkinkan mereka berpartisipasi dalam prakarsa perdamaian, karena protes kemungkinan besar akan berlanjut. Jika mereka tetap dipenjara.

Karena penghentian permusuhan kemungkinan besar akan rapuh dan sementara, ASEAN harus mengambil kesempatan untuk memfasilitasi dialog konstruktif antara pihak-pihak yang terlibat untuk secara terbuka mendiskusikan dan menyelesaikan perbedaan mereka sebagai langkah pertama menuju resolusi jangka panjang. Resolusi tersebut juga harus mencakup penciptaan saluran dialog permanen antara semua pihak di mana diskusi terbuka mengenai isu-isu yang diperdebatkan dapat diadakan kapan saja bila diperlukan di masa depan.

Mekanisme ini akan membantu mencegah pecahnya kekerasan di masa depan. Untuk mendapatkan kepercayaan dari semua pihak, ASEAN harus menampilkan diri sebagai perantara perdamaian yang jujur dan tidak memihak dan utusan khusus yang bertugas untuk mencari perdamaian di Myanmar harus selalu menjunjung tinggi netralitasnya. Secara bersamaan, ASEAN juga harus memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah yang menghadapi kelangkaan pasokan dasar seperti makanan, air dan obat-obatan.

Pengiriman ini juga harus diawasi secara ketat oleh ASEAN untuk memastikannya menjangkau masyarakat Myanmar. Setelah mencapai penyelesaian damai dan pemulihan pemerintahan sipil, ASEAN harus membentuk delegasi berbasis di Myanmar yang dipimpin oleh utusan khusus untuk mengawasi transisi damai kembali ke pemerintahan sipil dan untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi penyelesaian yang dirundingkan. Dalam proses ini, ASEAN harus mengakui bahwa Myanmar tidak pernah menjadi negara yang benar-benar bersatu sebagaimana tercermin dari konflik bersenjata yang tak berkesudahan antara berbagai organisasi etnis bersenjata (EAOs). dan Tatmadaw sejak kemerdekaan Burma pada Januari 1948. Sepanjang perjuangan puluhan tahun mereka untuk menentukan nasib sendiri, EAO dan etnis minoritas mereka masing-masing yang tinggal di pinggiran negara telah menentang Burmanisasi yang merupakan upaya pemerintah yang didominasi etnis Bamar untuk secara paksa mengasimilasi mereka ke dalam budaya mayoritas. Bamar Buddha dengan menghapus budaya, bahasa, agama, dan wilayah etnis minoritas mereka⁷

Resolusi tersebut juga harus mengakui dan secara terbuka menangani aspirasi berbagai kelompok etnis Myanmar. Mempertimbangkan meningkatnya kekerasan antara berbagai EAO dan pasukan pemerintah setelah runtuhnya Perjanjian Gencatan Senjata Nasional (NCA) dan Proses Perdamaian Myanmar sejak kudeta 1 Februari, Selain itu, ASEAN juga harus memasukkan Tatmadaw dalam dialog karena setiap upaya untuk segera mencabut mereka dari politik tidak realistis karena kepentingan ekonomi dan politik mereka yang besar di Myanmar.⁸ Setiap upaya untuk menghapus mereka dari posisi istimewa mereka diabadikan dalam Konstitusi 2008 hanya akan mengakibatkan perang saudara yang selanjutnya akan membuat negara tidak stabil. Namun demikian, ini bukan untuk mengatakan bahwa Tatmadaw akan selamanya memegang kekuasaan dalam politik Myanmar, mereka pada akhirnya akan bersedia mundur dari politik melalui

⁷ Gray, D. 2018. Myanmar memaksakan budaya Burma pada minoritas, menghapus identitas. Associated Press. Tersedia pada <https://apnews.com/article/southeast-asia-ap-top-news-international-newsasia-myanmar-249d72db491a47a79886c43b6085b6d2>. Diakses pada 22 Desember 2022

⁸ Stokke, K., dkk. 2018. Myanmar: Analisis Ekonomi Politik. Institut Urusan Internasional Norwegia. Tersedia pada <https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-political-economy-analysis>. Diakses pada 22 Desember 2022

saling percaya dan rekonsiliasi dengan masyarakat sipil yang dapat dipupuk melalui dialog dengan pemerintah sipil di masa depan. Namun, sebelum hal ini dapat dicapai, yang terbaik adalah mengikutsertakan mereka sebagai pihak dalam proses pembangunan negara.

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat dipaparkan terkait dengan permasalahan Hak Asasi Manusia etnis Rohingya dan pengangan oleh ASEAN sebagai salah satu organisasi internasional tingkat regional adalah sebagai berikut:

1. Dengan lima poin konsensus yang dirumuskan dalam ASEAN Leaders' Meeting yang diselenggarakan pada 24 April di Jakarta, ASEAN akhirnya meletakkan landasan untuk menyelesaikan krisis di Myanmar. Ada banyak cara untuk menyelesaikan situasi saat ini, tetapi aspek-aspek kunci mengenai perbedaan budaya dan politik di Myanmar dan kenyataan di lapangan harus diakui agar resolusi damai berhasil dalam jangka panjang. Pertama, ASEAN harus meredakan ketegangan antara semua pihak yang terlibat dan mengamankan komitmen kuat mereka menuju konsensus lima poin khususnya penghentian segera permusuhan sebelum situasi semakin memburuk.

Saran

Dalam penyusunan artikel ini tidak luput dari berbagai masalah dan kekurangan sehingga untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan pengkajian ulang dan penambahan referensi

DAFTAR RUJUKAN

- Aljazeera. 2021. Myanmar menargetkan Aung San Suu Kyi dengan tuduhan korupsi baru. Tersedia pada <https://www.aljazeera.com/news/2021/6/10/myanmar-targets-aung-san-suu-kyi-with-newcorruption-charges>. Diakses pada 22 Desember 2022
- ASEAN (2007) Piagam Asean Tersedia pada <http://bit.ly/ASEAN-Charter-2007>. Diakses pada 22 Desember 2022
- Gray, D. 2018. Myanmar memaksakan budaya Burma pada minoritas, menghapus identitas. Associated Press. Tersedia pada <https://apnews.com/article/southeast-asia-ap-top-news-international-newsasia-myanmar-249d72db491a47a79886c43b6085b6d2>. Diakses pada 22 Desember 2022
- Green P, T dkk. 2015. Hitung mundur ke Pemusnahan: Genosida di Myanmar, Prakarsa Kejahatan Negara Internasional. Tersedia pada <http://bit.ly/ISCI-Countdown-Myanmar-2015>. Diakses pada 22 Desember 2022
- PBB. 2016. Situasi HAM Muslim Rohingya dan minoritas lainnya di Myanmar, Laporan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, 29 Juni 2016
- Pernyataan Co- Chairs BRMC VI. Konferensi Tingkat Menteri Ke- enam Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational

- Crime, 23 Maret 2016. Tersedia pada <http://bit.ly/BaliProcess-2016>. Diakses pada 22 Desember 2022
- Stokke, K., dkk. 2018. Myanmar: Analisis Ekonomi Politik. Institut Urusan Internasional Norwegia. Tersedia pada <https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-political-economy-analysis>. Diakses pada 22 Desember 2022.
- UNHCR. 2016. Gerakan Campuran di Asia Tenggara 2016. Tersedia pada www.refworld.org/pdfid/590b18a14.pdf. Diakses pada 22 Desember 2022